



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

PENGUMUMAN

NOMOR: 06/MARITIM/SES/HM.00.00/XI/2019

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 356 Tahun 2019 tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun Anggaran 2019, maka Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia yang berminat untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

1. Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim;
3. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa;
4. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur;
5. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, IPTEK, dan Budaya Maritim;
6. Inspektorat.

II. KRITERIA PELAMAR

1. Kebutuhan dari masing-masing jabatan di peruntukan bagi pelamar dengan kriteria:
 - a. *Cumlaude* adalah pelamar yang merupakan lulusan terbaik dan berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*) dari perguruan tinggi dalam atau luar negeri, pada jenjang pendidikan Strata 1 (S-1)/ Strata 2 (S-2), tidak termasuk Diploma IV (D-IV);
 - b. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dengan kriteria mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - c. Putra/Putri Papua dan atau Papua Barat adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku;
 - d. Umum adalah pelamar yang tidak termasuk kriteria sebagaimana huruf a, b dan c di atas dan lulusan perguruan tinggi.
2. Pelamar sebagaimana angka 1 (satu) wajib memenuhi persyaratan pelamaran sebagaimana dalam pengumuman ini.

III. PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Persyaratan Umum
 - a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
 - b. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan batas maksimal sesuai kualifikasi pendidikan sebagai berikut:
 - 1) Diploma III (D-III), paling tinggi 26 (dua puluh enam) tahun 0 bulan 0 hari pada saat mendaftar;
 - 2) Strata 1 (S-1), paling tinggi 28 (dua puluh delapan) tahun 0 bulan 0 hari pada saat mendaftar;
 - 3) Strata 2 (S-2), paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun 0 bulan 0 hari pada saat mendaftar;
 - 4) Khusus pelamar Disabilitas paling tinggi 34 (tiga puluh empat) tahun 0 bulan 0 hari pada saat mendaftar.

- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Prajurit TNI/anggota POLRI, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta, termasuk pegawai BUMN/BUMD;
 - e. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/prajurit TNI, atau anggota POLRI;
 - f. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - i. Tidak menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif terlarang (dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk panitia, dan wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus berdasarkan Pengumuman Kelulusan Akhir Seleksi Penerimaan CPNS);
 - j. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
 - k. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga dan bagi pria tidak bertato/bekas tato dan tindik/bekas tindik anggota badan kecuali karena ketentuan agama/adat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah tempat setelah peserta dinyatakan lulus;
 - l. Kacamata/lensa kontak minus (rabun jauh) dan/atau plus (rabun dekat) dan/atau silindris dapat diberikan toleransi maksimal sampai ukuran 2 dioptri;
 - m. Menguasai Bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikat hasil *TOEFL/TOEFL Preparation/TOEFL Prediction* dengan nilai minimal 450 (setara dengan *Computer Based TOEFL* minimal 133/ *Internet Based TOEFL* minimal 45/ *TOEIC* minimal 405/ *IELTS* 5,0), dibawa pada saat Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
 - n. Setiap pelamar wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan pelamaran yang tercantum dalam pengumuman.
2. Persyaratan Khusus Pelamar *Cumlaude*
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi dalam negeri berpredikat dengan pujian (*cumlaude*) dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
 - b. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan predikat *cumlaude* dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi;
 - c. Pelamar untuk formasi *cumlaude* dibuktikan dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai dilegalisir sekurang-kurangnya oleh dekan atau sederajat (dokumen wajib dibawa pada saat Seleksi Kompetensi Bidang);
 - d. Dapat melamar pada formasi umum, dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama berdasarkan ketentuan penilaian berdasarkan formasi umum.
 3. Persyaratan Khusus Pelamar Disabilitas
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
 - b. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4 dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (apabila perguruan tinggi tersebut tidak menggunakan skala 4);
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol);
 - d. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan tingkat disabilitasnya;
 - e. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2, dengan kriteria:
 - 1) Mampu melihat, mendengar dan berbicara dengan baik;

- 2) Mampu melakukan tugas seperti menganalisa, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi;
 - 3) Mampu bergerak dengan menggunakan alat bantu berjalan selain kursi roda;
 - 4) Melampirkan surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa pelamar menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tungkai) dengan derajat 1 atau 2.
4. Persyaratan Khusus Putra-Putri Papua dan atau Papua Barat
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
 - b. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4 dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi (apabila perguruan tinggi tersebut tidak menggunakan skala 4);
 - c. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.75 (dua koma tujuh puluh lima);
 - d. Pelamar harus merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.
 5. Persyaratan Khusus Pelamar Umum
 - a. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
 - b. Calon pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat mendaftar setelah memperoleh penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan angka 4 dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan tinggi (apabila perguruan tinggi tersebut tidak menggunakan skala 4);
 - c. Pelamar merupakan lulusan Diploma III (D-III)/Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S-1)/Pasca Sarjana (S-2) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3.00 (tiga koma nol nol).

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Unggah Dokumen

- a. Swafoto dengan kartu identitas dan Kartu Informasi Akun;
- b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- c. Pasfoto terbaru paling lama 6 (enam) bulan terakhir, dengan latar belakang warna merah ukuran 4x6;
- d. Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta, cq Ketua Panitia Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019, diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta biru (format surat lamaran sesuai pada lampiran pengumuman);
- e. Ijazah asli (berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca);
- f. Transkrip nilai asli (berwarna/bukan hitam putih, bukan fotokopi, jelas dan terbaca);
- g. Bukti perguruan tinggi dan program studi terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), khusus akreditasi yang belum tertera dalam ijazah;
- h. Bagi pelamar dengan kriteria Cumlaude, perguruan tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat ijazah tersebut dikeluarkan;
- i. Bagi pelamar dengan kriteria Disabilitas, wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskemas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya (pelamar dengan kriteria disabilitas hanya dapat melamar pada formasi disabilitas);
- j. Bagi pelamar dengan kriteria Putra/Putri Papua dan Papua Barat, wajib melampirkan bukti keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak atau ibu) asli Papua, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Kepala Suku.

2. Alur Pendaftaran

a. Membuat akun

- 1) Akses portal SSCASN (Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara) pada alamat <https://sscasn.bkn.go.id>
- 2) Buat akun SSCN 2019 menggunakan Nomor Induk kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga;
- 3) Login menggunakan NIK dan *password* yang telah di daftarkan;
- 4) Isi biodata dan kolom lainnya;
- 5) Unggah pasfoto dengan latar belakang merah ukuran 4x6 dalam format JPG;
- 6) Cetak Kartu Informasi Akun.

b. Pelamar *log in* ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan *password* yang telah didaftarkan;

- 1) Pelamar mengunggah swafoto dengan Kartu Identitas dan Kartu Informasi Akun untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya;
- 2) Pelamar melengkapi data diri;
- 3) Pelamar memilih Instansi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dilanjutkan memilih jenis formasi, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data lain yang harus dilengkapi;
- 4) Dokumen yang diunggah harus berupa format *image* (.jpf/.jpeg/.png) atau berupa .pdf sesuai dengan ketentuan pada setiap jenis dokumen dengan memperhatikan keterangan jenis file yang diunggah;
- 5) Pastikan dokumen yang diunggah/upload dapat terbaca. Kesalahan dalam mengunggah/upload dokumen mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- 6) *Scan* Surat lamaran ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia di Jakarta, cq Ketua Panitia Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019, diketik menggunakan Komputer, bermaterai Rp. 6000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta biru;
- 7) *Scan* asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 8) *Scan* asli Ijazah. Bila pelamar lulusan luar negeri ditambahkan scan penyetaraan ijazah dan penyetaraan nilai dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi, kemudian dokumen digabungkan dalam satu file;
- 9) *Scan* asli Transkrip Nilai, bila dokumen lebih dari satu halaman maka dokumen digabungkan dalam satu file;
- 10) Pas photo berlatar belakang warna merah berukuran 4x6;
- 11) Simpan data yang telah dicek di form *Resume* dan pastikan bahwa data tersebut terisi dengan lengkap dan benar. Data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
- 12) Cetak dan simpan kartu pendaftaran SSCASN 2019 sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- 13) Pendaftaran dilaksanakan secara *online* mulai tanggal 11 November s.d 24 November 2019 (ditutup pukul 23.59 WIB);
- 14) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mencetak kartu peserta ujian secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> waktu akan diinformasikan lebih lanjut;
- 15) Khusus untuk pelamar yang berasal dari formasi khusus penyandang disabilitas, Panitia Seleksi melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran dengan mengundang calon pelamar untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat disabilitas yang disandang sebelum pengumuman hasil seleksi administrasi pada tanggal 26 s.d 27 November 2019.

V. TAHAPAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi terdiri dari :

- a. Seleksi Administrasi;
- b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test (CAT)* dengan bobot 40%;
- c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) substansi jabatan dengan bobot 60% terdiri dari:
 - 1) Tes Kompetensi Bidang Tugas (50%);
 - 2) Psikotest dengan bobot (35%);
 - 3) Wawancara dengan bobot (15%).

- d. Peserta yang dinyatakan lulus SKD dan SKB, wajib mengikuti tes kesehatan di Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk panitia;
 - e. Tes kesehatan meliputi:
 - 1) Jasmani: mata, gigi, jantung, darah dan urin.
 - 2) Rohani: Surat kesehatan mental dari dokter rumah sakit pemerintah yang masih berlaku.
 - f. Apabila hasil pemeriksaan Rumah Sakit merekomendasikan bahwa pelamar tidak memenuhi standar kesehatan sebagaimana item pada poin e, maka tes kesehatan dapat menggugurkan peserta;
2. Tempat pelaksanaan tahapan seleksi dilaksanakan di Jakarta.

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen/berkas lamaran yang telah diunggah dan kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh panitia pada laman <https://maritim.go.id> Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>
2. Kelulusan SKD didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Peserta SKB adalah peserta yang lulus SKD paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD;

VII. LAIN-LAIN

1. Pengumuman penerimaan dilakukan melalui laman <https://maritim.go.id>
2. Calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) formasi jabatan;
3. Peserta seleksi yang sudah dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdikan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak dihitung mulai tanggal PNS bermaterai Rp.6000,-. Dokumen wajib dibawa pada saat Seleksi Kemampuan Bidang (format surat pernyataan sesuai pada lampiran pengumuman);
4. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;
5. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
6. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi dan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi diberikan waktu 7 (tujuh) hari untuk memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah;
7. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri, dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kepada para peserta, keluarga dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan terkait seleksi penerimaan CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Apabila perbuatan tersebut diketahui, maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan kelulusannya akan digugurkan;
8. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019 dapat menghubungi:
 - a. *Call Center* yang dapat dihubungi Telephone: +6281298214622, pada hari Senin s.d. Jumat (hari kerja) pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB.
 - b. *Facebook*: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 - c. *Instagram*: @kemenkomarves

- d. Twitter: @kemenkomarves
9. Pengaduan Pelaksanaan seleksi CPNS melalui email: cpns.kemenkomarves@maritim.go.id
 10. Jadwal pelaksanaan SKB dapat berubah sewaktu-waktu. Peserta agar secara rutin memperhatikan laman <https://maritim.go.id>
 11. Apabila diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai/tidak benar dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, Panitia Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
 12. Keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat;

JADWAL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
TAHUN ANGGARAN 2019

No.	Jadwal Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan
1.	Pengumuman	11 November 2019
2.	Pendaftaran <i>online</i>	12 November s.d 26 November 2019
3.	Verifikasi Jenis/Tingkat Disabilitas	26 s.d 27 November 2019
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Desember 2019
5.	Masa Sanggah	17 s.d 19 Desember 2019
6.	Pengumuman Hasil Sanggah	26 Desember 2019
7.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020
8.	Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
9.	Pengumuman Akhir Seleksi CPNS Tahun 2019	April 2020

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 11 November 2019

Pt. Sekretaris Kementerian Koordinator

Selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS TA 2019,



Agung Kuswandono

Lampiran
 Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
 Republik Indonesia Tahun Anggaran 2019
 Nomor : 06/MARITIM/SES/HM.00.00/XI/2019
 Tanggal : 11 November 2019

FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
 TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
JUMLAH SELURUHNYA								
1	AHLI PERTAMA – ANALIS KEPEGAWAIAN	S-2 MANAJEMEN SDM				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO UMUM, ANALIS KEPEGAWAIAN
2	AHLI PERTAMA – PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO INFORMASI DAN HUKUM, PRANATA KOMPUTER
		S-1 SISTEM INFORMASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, PRANATA KOMPUTER
		S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1/D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1/D-IV SISTEM INFORMASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MARITIM, PRANATA KOMPUTER
		S-1 SISTEM INFORMASI				1	1	INSPEKTUR, PRANATA KOMPUTER

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	AHLI PERTAMA-PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM PIDANA / S-1 HUKUM PERDATA / S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL / S-1 HUKUM INTERNASIONAL				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI HUKUM DAN PERJANJIAN MARITIM, PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
4	ANALIS DIKLAT	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI/S-1 ADMINISTRASI /S-1 PSIKOLOGI / S-1 KELAUTAN	1				1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MARITIM, KEPALA BIDANG PENDIDIKAN KEMARITIMAN
		S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / D-IV ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / D-IV PSIKOLOGI / S-1 KELAUTAN / D-IV KELAUTAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MARITIM, KEPALA BIDANG PELATIHAN TEKNIS KEMARITIMAN
5	ANALIS HUKUM	S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI HUKUM DAN PERJANJIAN MARITIM, KEPALA BIDANG HUKUM LAUT DAN MARITIM INTERNASIONAL
		S-1 HUKUM INTERNASIONAL / S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI DELIMITASI ZONA MARITIM, KEPALA BIDANG PEMETAAN DAN TOPONIMI MARITIM
		S-1 HUKUM INTERNASIONAL / S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI DELIMITASI ZONA MARITIM, KEPALA BIDANG PERUNDINGAN BATAS MARITIM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
		S-1 HUKUM INTERNASIONAL / S-1 HUKUM LAUT		1			1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INTERNASIONAL						KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI DELIMITASI ZONA MARITIM, KEPALA BIDANG EKTENSI LANDAS KONTINEN
		S-1 HUKUM INTERNASIONAL / S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI NAVIGASI DAN KESELAMATAN MARITIM, KEPALA BIDANG PENANGGULANGAN KECELAKAAN DI LAUT
		S-1 ILMU HUKUM				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO INFORMASI DAN HUKUM, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		S-1 HUKUM				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI
		S-1 HUKUM				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK SUMBER DAYA HAYATI
		S-1 HUKUM				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI, KEPALA BIDANG KEANEKARAGAMAN HAYATI
		S-1 HUKUM				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI, DAN MONKONVENSIONAL, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUM LAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	ANALIS INDUSTRI	S-1 TEKNIK ELEKTRO / S-1 TEKNIK MESIN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR, ASISTEN DEPUTI INDUSTRI PENUNJANG INFRASTRUKTUR, KEPALA BIDANG INDUSTRI REKAYASA, KONSTRUKSI DAN INSTALASI
		S-1 TEKNIK MESIN / S-1 EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR, ASISTEN DEPUTI INDUSTRI PENUNJANG INFRASTRUKTUR, KEPALA BIDANG INDUSTRI MANUFAKTUR
7	ANALIS KEAMANAN	S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL / S-1 HUKUM INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU PELAYARAN / S-1 ANALIS INTELIJEN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI KEAMANAN DAN KETAHANAN MARITIM, KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN PENGAWASAN MARITIM
		S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL / S-1 HUKUM INTERNASIONAL / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ANALIS INTELIJEN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI KEAMANAN DAN KETAHANAN MARITIM, KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN KETAHANAN PULAU KECIL, TERLUAR DAN TERISOLIR
8	ANALIS MATERI SIDANG	S-1 MANAJEMEN/ S-1 KOMUNIKASI/ S-1 SASTRA INGGRIS/ S-1 KELAUTAN/ S-1 EKONOMI				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO INFORMASI DAN HUKUM, KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, KEPALA SUBBAGIAN PENYIAPAN BAHAN PERSIDANGAN
9	ANALIS MITIGASI BENCANA	S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI/ S-1 OCEANOGRAFI/ S-1 TEKNIK KELAUTAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI NAVIGASI DAN KESELAMATAN MARITIM, KEPALA BIDANG KESELAMATAN NAVIGASI NASIONAL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	ANALIS PARIWISATA	S-1 MANAJEMEN PARIWISATA/ D-IV MANAJEMEN PARIWISATA/ S-1 PARIWISATA/ D-IV PARIWISATA				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN, KEPALA BIDANG JASA PARIWISATA BAHARI
11	ANALIS PERENCANAAN	S-1 EKONOMI/ D-IV EKONOMI/ S-1 SOSIAL/ D-IV SOSIAL/ S-1 POLITIK/ D-IV POLITIK PEMERINTAH				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, KEPALA BAGIAN PROGRAM
12	ANALIS POTENSI KELAUTAN	S-1 PERIKANAN	1				1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN, KEPALA BIDANG PEMANFAATAN RUANG LAUT
		S-1 PERIKANAN/ D-IV PERIKANAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KLEBENCANAAN MARITIM, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN LINGKUNGAN LAUT
		S-1 PERIKANAN/ D-IV PERIKANAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN, KEPALA BIDANG JASA PARIWISATA BAHARI
		S-1 PERIKANAN/ S-1 KELAUTAN	1				1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM, KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PERINDUSTRIAN MARITIM
		S-1 PERIKANAN/ D-IV PERIKANAN/ S-1 KELAUTAN/ D-IV KELAUTAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								DAN TEKNOLOGI MARITIM, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ENERGI BARU TERBARUKAN MARITIM
		S-1 PERIKANAN/ D-IV PERIKANAN/ S-1 KELAUTAN/ D-IV KELAUTAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI JEJARING INOVASI MARITIM, KEPALA BIDANG JEJARING INOVASI PRODUK SUMBER DAYA ALAM MARITIM
13	ANALIS RANCANGAN NASKAH PERJANJIAN	S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL/ S-1 HUKUM INTERNASIONAL/ S-1 HUKUM LINGKUNGAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI HUKUM DAN PERJANJIAN MARITIM, KEPALA BIDANG PERJANJIAN BILATERAL DAN REGIONAL
14	ANALIS SISTEM INFOMASI	S-1/D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 KELAUTAN / D-IV KELAUTAN / S-1/D-IV MANAJEMEN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI PENDAYAGUNAAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI MARITIM, KEPALA BIDANG INTEGRASI SISTEM OBSERVASI KELAUTAN
15	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	S-1 EKONOMI/ D-IV EKONOMI/ S-1 SOSIAL/ D-IV SOSIAL/ S-1 ADMINISTRASI NEGARA/ D-IV ADMINISTRASI NEGARA/ S-1 ILMU PEMERINTAHAN/ D-IV ILMU PEMERINTAHAN/ S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/ D-IV KEBIJAKAN PUBLIK/ S-1 PERIKANAN/ D-IV PERIKANAN/ S-1 ILMU KELAUTAN/ D-IV ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN/ S-1 OSEANOGRAFI/ S-1 TEKNIK KELAUTAN/ D-IV TEKNIK KELAUTAN				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPALA BAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN, KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUN PROGRAM
16	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III MANAJEMEN ASET				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO UMUM,

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN, KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
17	PENGELOLA INFORMASI KERJASAMA	S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 HUKUM				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA, KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI
		S-1 PERENCANAAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA/ S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA / S-1 STATISTIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO PERENCANAAN, BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA, KEPALA SUBBAGIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA
		S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/S-1 SASTRA INGGRIS				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA, KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI
18	PENGELOLA PERSIDANGAN	S-1 HUKUM/ S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SASTRA INDONESIA / S-1 ILMU PEMERINTAHAN				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO INFORMASI DAN HUKUM, KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN, KEPALA SUBBAGIAN PERUMUSAN HASIL PERSIDANGAN
19	PENGOLAH BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 HUKUM / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO INFORMASI DAN HUKUM, KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								SUBBAGIAN PUBLIKASI
		S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO INFORMASI DAN HUKUM, KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN OPINI PUBLIK
20	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	S-1 ILMU HUKUM				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO INFORMASI DAN HUKUM, KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI, KEPALA SUBBAGIAN PERTIMBANGAN DAN BANTUAN HUKUM
21	PENYUSUN BAHAN KEBIJAKAN	S-1 HUKUM LAUT INTERNASIONAL/ S-1 HUKUM INTERNASIONAL/ S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL/ S-1 ANALIS INTELIJEN/ S-1 ILMU PELAYARAN/ S-1 OCEANOGRAFI/ S-1 TEKNIK KELAUTAN/ S-1 ILMU KELAUTAN/ S-1 ILMU PERIKANAN/ S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI KEAMANAN DAN KETAHANAN MARITIM, KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KETAHANAN MARITIM
		S-1 AKUNTANSI/ S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/ S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI/ S-1 PEMERINTAHAN/S-1 ADMINISTRASI	1				1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA HAYATI
		S-1/D-IV AKUNTANSI/ S-1/D-EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/ D-IV KEBIJAKAN PUBLIK/ S-1 HUKUM/ D-IV HUKUM/ S-1/D-IV MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI/ D-IV EKONOMI/ S-1 PEMERINTAHAN/ D-IV PEMERINTAHAN/ S-1/D-IV ADMINISTRASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI DAN NONKONVENSIAL, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA NONKONVENSIAL

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S-1/D-IV AKUNTANSI/ S-1/D-EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/ D-IV KEBIJAKAN PUBLIK/ S-1 HUKUM/ D-IV HUKUM/ S-1/D-IV MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI/ D-IV EKONOMI/ S-1 PEMERINTAHAN/ D-IV PEMERINTAHAN/ S-1/D-IV ADMINISTRASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI DAN NONKONVENSIAL, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA MINERAL
		S-1/D-IV AKUNTANSI/ S-1/D-EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/ D-IV KEBIJAKAN PUBLIK/ S-1 HUKUM/ D-IV HUKUM/ S-1/D-IV MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI/ D-IV EKONOMI/ S-1 PEMERINTAHAN/ D-IV PEMERINTAHAN/ S-1/D-IV ADMINISTRASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA MINERAL, ENERGI DAN NONKONVENSIAL, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ENERGI
		S-1/D-IV AKUNTANSI/ S-1/D-EKONOMI PEMBANGUNAN/ S-1 KEBIJAKAN PUBLIK/ D-IV KEBIJAKAN PUBLIK/ S-1 HUKUM/ D-IV HUKUM/ S-1/D-IV MANAJEMEN/ S-1 EKONOMI/ D-IV EKONOMI/ S-1 PEMERINTAHAN/ D-IV PEMERINTAHAN/ S-1/D-IV ADMINISTRASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI JASA KEMARITIMAN, KEPALA BIDANG JASA PARIWISATA BAHARI
		S-1 AKUTANSI / D-IV AKUTANSI /S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN /D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM /S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN /S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 PEMERINTAH /D-IV PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI / D-IV ADMINISTRASI / S-1 KELAUTAN /D-IV KELAUTAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI BUDAYA, SENI, DAN OLAH RAGA BAHARI, KEPALA BIDANG PENGUATAN KARAKTER BANGSA BAHARI
		S-1/ D-IV MANAJEMEN / D-IV EKONOMI /S-1 EKONOMI /S-1 PSIKOLOGI / S-1/D-IV ADMINISTRASI / D-IV PSIKOLOGI / S-1 KELAUTAN / D-IV KELAUTAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI BUDAYA, SENI, DAN OLAHRAGA BAHARI, KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN OLAHRAGA MARITIM
		S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV AKUTANSI / S-1 AKUTANSI / S-1 HUKUM /D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV HUKUM / S-1 MANAJEMEN / D-IV				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI JEJARING INOVASI MARITIM,

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		MANAJEMEN / D-IV EKONOMI / S-1 EKONOMI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI						KEPALA BIDANG JEJARING INOVASI PARIWISATA BAHARI
		S-1 AKUTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / D-IV AKUTANSI / D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / S-1 MANAJEMEN / D-IV PEMERINTAH / S-1 ADMINISTRASI / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI / S-1 KELAUTAN / D-IV KELAUTAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MAUSIA, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, ASISTEN DEPUTI JEJARING INOVASI MARITIM, KEPALA BIDANG JEJARING INOVASI PELAYARAN RAKYAT
		S-1/ D-IV AKUTANSI / S-1/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / S-1/D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1/D-IV ADMINISTRASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN KEBENCANAAN MARITIM
		S-1/ D-IV AKUTANSI / S-1/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / S-1/D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1/D-IV ADMINISTRASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI LINGKUNGAN DAN KEBENCANAAN MARITIM, KEPALA BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN LAUT
22	PENYUSUN BAHAN PROSES PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KETENAGAAN	S-1 MANAJEMEN SDM/ S-1 TEKNIK INFORMATIKA				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO PERENCANAAN, KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN REFORMASI BIROKRASI, KEPALA SUBBAGIAN DUKUNGAN REFORMASI BIROKRASI
23	SEKRETARIS	D-III SEKRETARIS				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO UMUM, KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN PROTOKOL, KEPALA SUBBAGIAN TATA

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								USAHA STAF AHLI
24	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	D-III MESIN/ D-III LISTRIK/ D-III ELEKTRO			1	1	2	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO UMUM, KEPALA BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN, KEPALA SUBBAGIAN RUMAH TANGGA
25	AHLI PERTAMA – ANALIS KEBIJAKAN	S-1 KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH / S-1 OCEANOGRAFI / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDAULATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI DELIMITASI ZONA MARITIM, ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 OCEANOGRAFI / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 ILMU PERIKANAN / S-1 MANAJEMEN TRANSPORTASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI KEDUALATAN MARITIM, ASISTEN DEPUTI NAVIGASI DAN KESELAMATAN MARITIM, ANALIS KEBIJAKAN
		S-1/D-IV AKUNTANSI / S-1/D-IV EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / S-1/D-IV MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1/D-IV ADMINISTRASI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA ALAM DAN JASA, ASISTEN DEPUTI SUMBER DAYA HAYATI, ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 KOMUNIKASI / S-1 HUKUM				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR, SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR, ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 PLANOLOGI / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 MANAJEMEN LOGISTIK / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK SIPIL	2			1	3	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR, ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR, KONEKTIVITAS, DAN SISTEM LOGISTIK, ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 TEKNIK GEOLOGI / S-1 TEKNIK PERTAMBANGAN				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR, ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PERTAMBANGAN DAN ENERGI, ANALIS KEBIJAKAN

NO.	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI				JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN
			CUMLAUDE	DISABILITAS	PUTRA/I PAPUA DAN PAPUA BARAT	UMUM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		S-1 PERIKANAN TANGKAP / S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERKAPALAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN	1			1	2	DEPUTI BIDANG KOORDINASI INFRASTRUKTUR, ASISTEN DEPUTI INFRASTRUKTUR PELAYARAN, PERIKANAN, DAN PARIWISATA, ANALIS KEBIJAKAN
26	AHLI PERTAMA ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO UMUM, ARSIPARIS
27	AHLI PERTAMA PERENCANA	S-1 SOSIAL / D-IV SOSIAL / S-1 POLITIK / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV POLITIK PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1/D-IV ILMU EKONOMI				1	1	DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI SUMBER DAYA MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI, DAN BUDAYA MARITIM, PERENCANA
28	AHLI PERTAMA PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI				1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN, KEPALA BIRO UMUM, PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT
JUMLAH FORMASI			7	1	1	63	72	

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator
Selaku Ketua Panitia Seleksi CPNS TA 2019,



Agung Kuswandono

Template: Surat Lamaran

Jakarta, November 2019

Yth.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Cq. Ketua Panitia Seleksi CPNS Kementerian Koordinator
Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2019
Di –
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pelamar.
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 25 Desember 1999
Jenis kelamin : Pria/Wanita
Pendidikan : Sarjana (Jurusan) Universitas
Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili : Jl. Jenderal Achmad Yani Nomor. 8
Kota Bengkulu

Dengan ini menyampaikan surat lamaran dalam rangka mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2019. Sebagai bahan pertimbangan, berikut disampaikan berkas administrasi asli dalam bentuk file elektronik pdf, sebagai berikut :

1. Unggah Surat Lamaran bermaterai Rp. 6000,- ditujukan Kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta dan ditandatangani dengan pena bertinta biru.
2. Unggah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Fotocopy Surat Keterangan telah melakukan Rekaman Kependudukan atau Fotocopy Kartu keluarga (KK) *
3. Unggah Ijazah S-2/S-I/D-IV/D-III *
4. Unggah Transkrip Nilai Ijazah S-2/S-I/D-IV/D-III *
5. Unggah Pas photo berlatar belakang warna merah ukuran 3 x 4 (asli)
6. Unggah Surat Pernyataan harus diketik dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna biru bermaterai Rp.6000,-. Dokumen wajib dibawa pada saat Seleksi Kompetensi Bidang.
7. Unggah Surat pernyataan bersedia mengabdikan dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS harus diketik dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena berwarna biru bermaterai Rp.6000,-. Dokumen wajib dibawa pada saat Seleksi Kompetensi Bidang.

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan adalah benar. Apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan / kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2019. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

MATERAI 6000 TTD

(Pelamar)

Catatan:

- * Dapat dipilih salah satu, sesuai dokumen yang dimiliki
- ** Diperlukan apabila wilayah domisili tidak sesuai dengan wilayah domisili pada KTP.

Template: Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Pelamar.
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 25 Desember 1999
Jenis kelamin : Pria/Wanita
Pendidikan : Sarjana (Jurusan) Universitas
Jabatan yang dilamar : Pranata Komputer
Alamat Domisili : Jl. Jenderal Achmad Yani
Nomor. 8 Kota Bengkulu,

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, anggota TNI / POLRI, Pegawai BUMN / BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas Pemerintah.
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
6. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
7. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah peserta dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir)
8. Tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (wanita)* dan tidak bertato / bekas tato dan tindik / bekas tindik anggota badan lainnya yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat (pria)*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari ditemukan data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan keikutsertaan/ kelulusan saya pada seleksi CPNS Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun Anggaran 2019. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, November 2019

Yang membuat pernyataan

MATERAI 6000 TTD
(Pelamar)

Catatan:

*Dapat dipilih salah satu, sesuai dengan jenis kelamin pelamar.

**Template: Surat Pernyataan Bersedia
Mengabdikan Minimal 10 (sepuluh) Tahun**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pelamar.
Tempat/Tanggal Lahir : Bengkulu, 25 Desember 1999
Jenis kelamin : Pria/Wanita
Pendidikan : Sarjana (Jurusan) Universitas
Jabatan yang dilamar :
Alamat Domisili : Jl. Jenderal Achmad Yani Nomor. 8
Kota Bengkulu,

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia mengabdikan pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

Apabila dikemudian hari saya mengingkari pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Bengkulu, November 2019

Yang membuat pernyataan

MATERAI 6000 TTD
(Pelamar)

Catatan:

*Dapat dipilih salah satu, sesuai dengan jenis kelamin pelamar.